
**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH**
*Optimization of Local Own-Source Revenue for Improving the Welfare
of the People of Central Kalimantan*

Much Dody Kharisma Anwar ^{1*}

Agus Suradika ²

Taufiqurrahman ³

^{*123} Universitas Muhammadiyah
Jakarta, Jakarta, Indonesia

*email:

much.dodykharisma@student.umj.ac.id

Abstrak

Pembangunan Daerah sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang di miliki pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Strategi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memacu dan mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggali, mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah dengan didukung regulasi, kelembagaan dan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dengan menyempurnakan sistem yang berbasis teknologi informasi yang efektif, dan pengembangan kerjasama antar daerah untuk pengamanan dan pencapaian target. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) menggunakan pendekatan kualitatif, Adapun subjek penelitian yaitu orang, tempat, benda, Lembaga ataupun organisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat alternatif kebijakan yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu membangun infrastruktur, meningkatkan investasi, peningkatan SDM, dan pembuatan serta penyesuaian regulasi sebagai standar operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kata Kunci:

Optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah
Kesejahteraan Masyarakat

Keywords:

Optimization
Local Own-Source Revenue
Community Welfare

Abstract

Regional development is closely related to the region's financial capacity and the availability of facilities and infrastructure owned by the local government to realize community welfare. The strategy of the Central Kalimantan Provincial Government to encourage and accelerate development for the welfare of the people involves exploring and developing sources of regional revenue, supported by appropriate regulations, institutional frameworks, and human resources, as well as adequate facilities and infrastructure. This is accompanied by the refinement of systems based on effective information technology and the development of inter-regional cooperation to ensure security and achievement of targets. This research is a type of field research using a qualitative approach. The subjects of the study include individuals, places, objects, institutions, or organizations. The results of this study indicate that there are four policy alternatives that need to be considered to increase local revenue (PAD) in Central Kalimantan Province, namely: infrastructure development, investment enhancement, human resource development, and the creation and adjustment of regulations as operational standards for tax and retribution collection in the province.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah sangat mempengaruhi nasib suatu daerah karena kemampuan suatu daerah untuk tumbuh dan mengembangkan kapasitasnya untuk menjadi daerah yang mandiri bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan terfasilitasi oleh pengelolaan wilayah yang dilakukan secara ekonomis, efektif, dan efisien (fulfilling value for money); selain itu, pengelolaan ini juga harus memenuhi tata kelola keuangan yang kuat (partisipasi,

transparansi, tanggung jawab, dan memenuhi kewajiban). Pemerintahan daerah membutuhkan sumber daya keuangan begitu pun sumber daya manusia, seperti yang dijelaskan dalam anggaran pemerintah daerah (Wadma, 2016).

Setiap pemerintah daerah memiliki satu tujuan yakni menginginkan pertumbuhan ekonomi daerahnya meningkat beriringan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai hal tersebut, salah satunya dapat didorong melalui pengoptimalan penerimaan yang berasal dari PAD. PAD merupakan

sumber pendapatan asli suatu daerah yang digunakan sebagai modal pemerintahan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Menurut Pujiati (2008), adanya kewenangan dari daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, maka akan memberi peningkatan komposisi PAD itu sendiri sebagai penerimaan daerah. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, akan lebih menambah eksternalisasi yang bersifat positif serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik, untuk menunjang pembangunan di daerah tersebut. Dengan penerapan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses pembangunan ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi umat manusia.

Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Nadir, 2013).

Oleh karena itu, maka sangat menarik untuk diteliti lebih jauh tentang perubahan kontribusi sektoral yang terjadi telah di dasarkan kepada strategi kebijakan pembangunan yang tepat, yaitu strategi yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami suatu konteks tertentu dengan membaca secara cermat dan mendiskusikan pendeskripsian yang ditulis mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam lapangan studi (Nugrahani, 2014:87). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini dengan wawancara ialah dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah.

Teknis Analisis Data dalam penelitian ini, terdapat tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data: Tahap ini merupakan upaya untuk menyederhanakan dan mengabstraksi data mentah yang dikumpulkan dari lapangan. Data yang direduksi termasuk semua informasi terkait dengan masalah penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data tambahan jika diperlukan. Semakin lama penelitian berlangsung atau semakin banyak interaksi dengan lapangan, semakin kompleks dan banyaknya data yang terkumpul. Oleh karena itu, reduksi data penting untuk menghindari penumpukan data yang berlebihan dan memudahkan analisis.

2. Penyajian Data: Setelah proses reduksi data selesai, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Tujuan penyajian data adalah mengorganisir, menyusun, dan mengolah data yang telah direduksi agar menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti narasi, grafik, korelasi antar kategori, atau diagram alur. Ini akan membantu peneliti dalam memahami informasi yang ada dan menjawab pertanyaan penelitian.

Kesimpulan atau Verifikasi: Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah diolah sebelumnya untuk mencari makna, pola, penjelasan, atau proposisi yang relevan. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari penelitian dan digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Sebelumnya, peneliti telah melakukan rangkaian kegiatan, mulai dari reduksi data hingga penyajian data, sebagai landasan untuk menarik kesimpulan yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian guna memberikan serta memamparkan jawaban terkait permasalahan yang diteliti mengenai Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah.

Machfud Sidik (2017:8) membahas optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dalam konteks ini, ada beberapa indikator yang perlu diidentifikasi:

1. Tujuan: Tujuan optimalisasi bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Maksimisasi digunakan jika tujuan adalah terkait dengan keuntungan, penerimaan, atau hal serupa. Minimisasi dipilih jika

tujuan adalah terkait dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penting untuk memahami apa yang akan diminimalkan atau maksimumkan dalam proses optimalisasi.

2. Alternatif Keputusan: Ketika pengambilan keputusan terkait dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, biasanya ada beberapa pilihan atau alternatif yang tersedia. Alternatif keputusan ini harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang terbatas yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Alternatif keputusan adalah langkah-langkah atau aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Sumber Daya yang Dibatasi: Sumber daya merupakan segala hal yang harus dipersembahkan atau dikorbankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini memiliki batasan atau keterbatasan. Terlibat dalam penggunaan sumber daya ini akan mengakibatkan kebutuhan untuk menjalani proses optimalisasi oleh para pelaksana tugas.

Berikut ini adalah target dan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 9 tahun terakhir :

Target & Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah 2016 – 30 September 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
2016	Rp 1.233.094.359.800,00	Rp 1.158.303.928.014,00	93,93
2017	Rp 1.342.494.134.000,00	Rp 1.342.330.616.785,00	99,99
2018	Rp 1.402.905.478.027,00	Rp 1.616.521.660.227,00	115,23
2019	Rp 1.693.371.866.910,00	Rp 1.776.231.952.740,00	104,89
2020	Rp 1.485.940.751.841,00	Rp 1.570.137.570.176,00	105,67
2021	Rp 1.702.147.306.659,00	Rp 1.852.396.598.493,00	108,83
2022	Rp 2.301.118.322.341,00	Rp 2.422.893.262.581,10	105,29
2023	Rp 2.432.221.262.954,00	Rp 2.518.443.574.719,68	103,55
2024	Rp 2,684,640,636,260,00	Rp 1,923,065,957,744.73	71,63

Sumber : Buku Pintar Bapenda Edisi September 2024

Optimalisasi adalah proses untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan, dengan mengidentifikasi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi (Prima dalam Brata, 2017). Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki potensi alam yang berlimpah tidak hanya dari sektor sumber daya tetapi juga pada sektor pariwisata.

Namun, Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi berbagai kendala dalam upaya menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga PAD Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, dan disposisi sangat berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan optimalisasi.

1. Tujuan

Tujuan adalah implementasi dari misi organisasi, mencakup pencapaian dalam jangka waktu tertentu. Tujuan umumnya berkaitan dengan maksimisasi atau minimisasi terkait keuntungan dan penerimaan.

Faktor pendukung Bapenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak

daerah adalah adanya dukungan dari pimpinan, potensi yang sangat besar serta wilayah yang cukup luas membuat optimis bahwa PAD mampu digali seoptimal mungkin. Sedangkan faktor penghambatnya kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan perusahaan di Kalimantan Tengah cenderung tertutup dan tidak transparan. Selain itu Bapenda belum memiliki anggaran khusus untuk dating langsung kelokasi operasional perusahaan.

Strategi optimalisasi pendapatan asli daerah adalah dengan memperkuat regulasi, melakukan pendekatan sosial dan memaksimalkan upaya peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak, seperti : PKB dan BBN-KN, Pajak Rokok, PAP dan PBB-KB. Sumber-sumber pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bisa Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan (PAP); dan Pajak Rokok. Sedangkan sumber retribusi terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ KalawaAtei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kalimantan Tengah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pelayanan Pendidikan. Selain itu pajak daerah mampu mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah dimana pendapatan masyarakat semakin meningkat, lapangan pekerjaan tersedia dan juga layanan umum seperti Kesehatan dan Pendidikan yang semakin baik. Hal ini dirasakan sendiri oleh masyarakat.

2. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah memerlukan upaya kolektif. Beberapa upaya yang dilakukan termasuk pembinaan administrasi, peningkatan infrastruktur, pelayanan publik yang lebih baik, dan pengembangan produk-produk pelayanan. Selain itu, penerapan penggunaan sistem digital dalam

pemungutan pajak dan retribusi juga menjadi alternatif yang sedang diupayakan. Ini diharapkan akan membantu mengoptimalkan pendapatan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Sumber Daya

Sumber daya terbatas diperlukan untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan berbagai faktor, termasuk komitmen dari pihak terkait, sosialisasi, dan penerapan sanksi. Strategi yang dapat digunakan mencakup pengembangan infrastruktur, publikasi kewajiban pajak, diversifikasi produk pelayanan, peningkatan SDM, kerjasama dengan sektor swasta, pengembangan komunitas lokal, dan konservasi lingkungan. Semua ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

KESIMPULAN

Strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari tujuan, sasaran, hasil spesifik dan aktivitas/kegiatan. Terdapat empat alternatif kebijakan yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu membangun infrastruktur, meningkatkan investasi, peningkatan SDM, dan pembuatan serta penyesuaian regulasi sebagai standar operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian memperkuat regulasi yang berkaitan dengan optimalisasi pajak daerah. melakukan pendekatan sosial, memaksimalkan upaya peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak, seperti PKB dan BBNKN, PAP, PBB-KB dan pajak rokok. Penyediaan lapangan kerja hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki pendapatan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya

mampu meningkatkan jumlah pendapatan. Kondisi usaha dan faktor ekonomi lainnya. Peningkatan layanan umum masyarakat melalui kesehatan, pendidikan dan sosial..

REFERENSI

- Amelia, R. R., & Yuwono, D. T. (2024). Supporting learning information system through knowledge management optimization using long short-term memory method. *KnE Social Sciences*, 2024, 361–371.
- Buka rapat optimalisasi dan sosialisasi pajak dan retribusi daerah tahun 2024, Asisten Ekbang sebut capaian realisasi PAD Kalteng 102,62%. (n.d.). Laporan ini mengulas capaian realisasi PAD Kalimantan Tengah yang melebihi target, serta strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah.
- DPRD Palangka Raya dorong optimalisasi pendapatan asli daerah. (n.d.). Inisiatif DPRD Palangka Raya dalam mendorong pemerintah kota untuk mengoptimalkan PAD melalui strategi yang tepat.
- Hariyanti, A., & Rahayu, T. P. (2024). Implementation of good governance in improving public service performance at BNNP Central Borneo. *Journal of Public Administration Science: Policy Dynamics Public Services and Bureaucracy Transformation*, 1(1), 1–6.
- Kepala Badan Pendapatan Prov. Kalteng bahas optimalisasi PAD pada dialog interaktif Kalteng Bicara. (n.d.). Diskusi mengenai strategi optimalisasi PAD, termasuk peran pajak kendaraan bermotor dan pemutihan BBNKB dalam meningkatkan pendapatan daerah.
- Komparasi perkembangan pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan belanja daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. (n.d.). Analisis komparatif yang menunjukkan pentingnya strategi dan inovasi dalam menggali potensi PAD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui inovasi. (n.d.). Artikel ini membahas proyeksi dan strategi peningkatan PAD melalui inovasi dan pemberlakuan opsen pajak di Kalimantan Tengah.
- Pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah. (n.d.). Penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara pengelolaan APBD dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.

- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah. (2016). Peraturan yang menetapkan langkah-langkah strategis dalam optimalisasi pendapatan daerah, termasuk pelaporan data kendaraan bermotor dan pemanfaatan air permukaan.
- Pratama, M. A., & Mustikaningsih, W. (2022). Politik kesejahteraan; Analisa kesejahteraan masyarakat dalam kondisi triple disruption (Kajian para pedagang kuliner lokal desa wisata; antara pelabuhan Rambang dan dermaga Kereng Bengkirai). *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 430–441.
- Pj Sekda: Optimalkan sumber PAD, upaya Pemda tingkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng. (n.d.). Artikel ini menyoroti pentingnya inventarisasi potensi retribusi daerah dan evaluasi peraturan daerah untuk mendukung optimalisasi PAD.
- Sektor strategis perlu dioptimalisasi guna peningkatan PAD. (n.d.). Artikel ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan terencana dalam meningkatkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan.
- Strategi optimalisasi pendapatan pajak daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. (n.d.). Skripsi ini membahas strategi peningkatan pendapatan pajak daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.
- Satia, M. R., Irwani, I., Riyanti, N., Selawaty, D., & Rahman, S. (2024). Study of urban area development: Consistency of urban policy and planning based on local wisdom of the Dayak tribe. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 13(1).
- Surya, R. A., Ridho, F., & Yuwono, D. T. (2024). Analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap trend digital forensik pada saat pemilu Indonesia: The bibliometric analysis using VOSviewer on digital forensics trends during the Indonesian election. *Pencerah Publik*, 11(1), 33–41.
- Yusuf, M., Bernardianto, R. B., Satia, H. M. R., Nurhasanah, N., Irwani, I., Setyoko, P. I., & Saputra, A. S. (2023). Investigating the role transformational leadership, innovative work behavior, and team member exchange on public service organization performance. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(6), e868-e868.
- Yusuf, M., Satia, M. R., Bernardianto, R. B., Nurhasanah, N., Irwani, I., Kurniasih, D., & Setyoko, P. I. (2023). Exploring the role of digital leadership and digital transformation on the performance of the public sector organizations. *International Journal of Data and Network Science*, 7(4), 1983–1990.
- Yuwono, D. T., & Hariyanti, A. (2024). Applying clustering and recommendation system for effective supervision in Central Kalimantan Inspectorate. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)*, 6(2), 367–374..